

## Pasang Surut Politik dan Sejarah Isu Kebijakan Sawit di Riau

### *Political Ups And Downs of Policy Issues Palm Oil in Riau*

Khairul Anwar<sup>1\*</sup>, Ishak<sup>2</sup>, Isril<sup>3</sup>, Erman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Email Korespondensi: [khairul.anwar@lecturer.unri.ac.id](mailto:khairul.anwar@lecturer.unri.ac.id)

Diterima: 15 November 2021

Direvisi: 10 Desember 2021

Disetujui: 29 Desember 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i2.218](https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.218)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan menemukan konteks politik sejarah pasang surut isu kebijakan sawit di Riau dengan mengambil fokus masa awal reformasi 2000-2010. Latar belakangnya pergulatan politik aktor dalam sejarah isu kebijakan sawit sejak kolonial hingga awal reformasi Indonesia termasuk di Riau. Argumentasinya adalah akumulasi pasang surut isu politik sawit, terjadi pada awal reformasi. Pertanyaannya, bagaimana pasang surut interaksi politik aktor tersebut berlangsung di Riau? Dalam menjawab pertanyaan dipakai teori dan metode analisis *modern political economy* Jeffry Frieden. Pasang surut politik terkait isu kebijakan sawit terjadi sejak diterapkan UU.No.32/tahun 2009 dan UU.No.25/ tahun 1999. Dalam era rezim ORBA tuntutan politik hanya dilakukan para politisi di DPRD dan Birokrasi lokal. Sepanjang tahun 2000-2010, aktor lokal yang melakukan aksi memperjuangkan isu sawit spektrumnya semakin melebar, ada banyak aktor lokal dalam batas tertentu bersifat pasif kemudian menjadi viral. Masa transisi politik ini diungkapkan melalui fakta munculnya sejumlah aktivis masyarakat sipil, teknokrat dan pemerintah. Ada aktor pemerintah bersikap setuju, menolak dan setuju dengan usulan. Para aktor memiliki strategi, taktik, dan kiat dalam berkoalisi sesuai dengan posisinya. Dalam konteks politik lokal pluralistik seperti inilah, pasang surut politik lokal isu kebijakan sawit terjadi sebagai hasil interaksi aktor lokal dan nasional.

**Kata Kunci:** Politik, Sejarah, Sawit, Kebijakan, Reformasi

**Abstract:** This article aims to find the historical-political context of the ups and downs of oil palm policy issues in Riau by focusing on the early 2000-2010 reform period. The background is the political struggle of factors in the history of palm oil policy issues from colonial to early Indonesian reform, including in Riau. The argument is that the ups and downs of the political issue of palm oil occurred at the beginning of the reformation. How did the ups and down so political interaction between these actors take place in Riau? In answering the questions, Jeffry Frieden used theories and modern political economy analysis methods. Political ups and downs related to palm oil policy issues have occurred since Law No. 32/2009 and UU. No. 25/1999 were implemented. In the ORBA regime, politicians only made political demands in the DPRD and local bureaucracies. During 2000-2010, local actors who fought for the issue of palm oil had a wider spectrum. To a certain extent, many local actors were passive and then went viral. This period of political transition is expressed because several civil society activists, technocrats and the government have emerged. There are government actors who agree, reject and agree with the proposal. According to their position, the actors have strategies, tactics, and tips in forming a coalition. In the context of pluralistic local politics like this, the ups and downs of local politics on oil palm policy issues occur due to the interaction of local and national actors.

**Keywords:** Politics, History, Palm Oil, Policy, Reform

## Pendahuluan

Dalam konteks sejarah perkebunan di Indonesia, pasang surut politik isu kebijakan sawit dimulai dari kedatangan Cornelius de Houtman tahun 1596 di Banten (Saragih, 2010). Sejak itu mulai tarik menarik kepentingan antara aktor politik pribumi, pengusaha klien dan negara kolonial terjadi (Muhaimin, 1990). Fenomena ini dipandang sebagai titik berangkat memaknai konsep pasang surut politik dan hubungan dualitas sejarah isu kebijakan sawit di

Indonesia (Santoso et al., 2018). Isu kebijakan dimaksudkan sebagai sesuatu yang diwacanakan di tengah masyarakat tentang masalah dan konsekuensi kebijakan berbeda (Parsons, 1996). Sejarah Isu besar kebijakan sawit bermula dari proses industri gula di sekitar Jacatra (Batavia yang sekarang ibu kota, Jakarta), seperti yang dilaporkan (Saragih, 2010). Studi ini mencatat bahwa industrialisasi berjalan seiring kedatangan Belanda, Spanyol dan Eropa yang mengenalkan tanaman kakao, kopi, teh, kina, karet, dan kelapa sawit. Kelapa sawit di bawa ke Indonesia pada tahun 1848 oleh pemerintah Belanda (Fauzi et al., 2012). Beberapa kajian menginformasikan bahwa industrialisasi perkebunan dimulai sebagai aplikasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa revolusi industri di Eropa (Saragih, 2010). Dalam penerapannya, proses industrialisasi perkebunan berlangsung untuk kepentingan politik dan ekonomi negara kolonial (Nordholt & Klinken, 2007). Dalam kondisi ini, muncullah pada waktu itu berbagai isu kebijakan sebagai akibat dominasi aktor dalam bisnis perkebunan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia (Anwar, 2019).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membuat berbagai kebijakan di bidang perkebunan masa rezim kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA). Isu utamanya untuk menghapus struktur dominasi aktor masa penjajahan. Dalam periode ini dirumuskan kebijakan dasar bidang perkebunan. Pemerintah bersama pemilik modal pribumi, pengusaha klien menempuh langkah nasionalisasi (Muhaimin, 1990). Perusahaan Perkebunan Besar kelapa sawit pada tahun 1957. Tahun 1967 pemerintah kembali mengambil kebijakan nasionalisasi perusahaan milik pengusaha Inggris, Perancis, Belgia, dan Amerika. Selanjutnya, kebijakan restrukturisasi Perusahaan Nasional Perkebunan (PNP/PTP) tahun 1957-1960 dan Pembentukan PPN baru di samping PPN lama. tahun 1961-1962 (Lubis & Adlin U, 1992). Isu nasionalisasi dan strukturisasi ini, di Riau diimplementasi melalui PNP/PTP II, IV, V di tengah isu lemahnya koordinasi (Lestari & Ridwan, 2016); dan inilah sejarah dimulainya industrialisasi kelapa sawit di Riau melalui pola PIR BUN/NES maupun PIR-Trans (Anwar, 2012).

Pada masa Orde Baru (ORBA), kembali pemerintah didukung para teknokrat memasukkan bidang perkebunan ke dalam agenda kebijakan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I. Agenda berupa rehabilitasi pabrik-pabrik pengolahan sawit, perluasan areal tanaman guna pertumbuhan ekonomi (Muhaimin, 1990). Isu kebijakannya adalah sebagai langkah usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, penerimaan devisa serta mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah mengambil kebijakan meningkatkan produksi, melalui peremajaan sawit, penanaman baru serta konversi kelapa sawit, karet dan kelapa. Selain itu, pemerintah melakukan langkah modernisasi dan perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Kemudian dilanjutkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) II, pemerintah bersama para teknokrat menetapkan isu kebijakan utama peningkatan produksi perkebunan untuk ekspor, penyediaan bahan baku serta menekan impor. Pada masa inilah, pemerintah menggagas ide perkebunan kelapa sawit rakyat dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan tujuan untuk membina secara terpadu pengembangan perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat diharapkan bisa berkembang menjadi intensif menghasilkan komoditi yang bermutu. Perkebunan besar bertugas memberikan penyuluhan, pembinaan menyediakan bibit unggul, sarana produksi, mengolah hasil, dan pemasaran. Kepentingan birokrasi sebagai langkah adaptasi diimplementasikan melalui pembinaan, pemberian kredit atau anggaran kepada petani peserta PIR maupun swadaya (Yasa et al., 2021). Kebijakan ini diintegrasikan dengan berbagai kebijakan misalnya program transmigrasi, koperasi dan Keluarga Berencana (KB) (Yusri & Adlin, 2020).

Berbagai langkah dari tindakan mencapai tujuan kebijakan pemerintah pusat seperti diuraikan di atas tidak terjadi di Riau. Di provinsi ini perdebatan terhadap isu kebijakan sawit

menghasilkan kekecewaan. Intensitas dan spektrumnya kekecewaan itu semakin meluas terutama pada awal reformasi 2000-2010. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekecewaan itu berpotensi besar menimbulkan konflik sosial dan anarkisme, gap pengorganisasian, teknologi dan sumber daya manusia misalnya PBS/PTP dengan perkebunan sawit swadaya semakin melebar (Anwar, 2021; Faucher, 2008; Syahzaetal., 2020). Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya pasang surut perdebatan politik konteks isu kebijakan sawit itu terjadi di Riau tahun 2000-2010?

Secara faktual, fenomena pro-kontra aktor formal dan informal terhadap isu sawit di atas terkait kebijakan publik (Santoso et al., 2018). Sebab kebijakan publik adalah persoalan Siapa, memperoleh Apa, Kapan, dan Bagaimana seperti yang diungkapkan oleh Lasswell (1986) dan Mengapa ? pertanyaan yang diajukan oleh Muhaimin (1990). Dinamika pergulatan inilah kembali dielaborasi oleh Frieden et al. (2000) melalui analisis *modern political economy*. Teori ini diperkuat studi yang dilakukan (Anwar, 2019; Syahzaetal., 2020). Dalam uraian sebelumnya disampaikan bahwa intensitas dan spektrum tarik menarik kepentingan antara aktor politik inilah dipandang sebagai pasang surut politik dan memiliki hubungan dualitas terhadap sejarah isu kebijakan sawit yang terakumulasi tahun 2000-2010 di Riau. Sementara itu, alasan memilih provinsi ini sebagai area studi adalah karena Riau dikenal sebagai daerah yang paling intensif dan ekstensif menerapkan kebijakan sawit di Indonesia, terutama hingga awal OTDA (Casson, 2000). Provinsi Riau, pada awal reformasi dalam kaitan isu kebijakan sawit ini menarik untuk dikaji lebih dalam melalui tuntunan literatur ekonomi-politik lokal. Paling tidak ada tiga alasan mengapa tahun 2000-2010 menarik mengkaji pasang surut politik dan isu kebijakan sawit di Riau. *Pertama*, karena Riau menjadi salah satu sasaran utama penerapan kebijakan kelapa sawit yang intensif, maka daerah ini menghasilkan pertumbuhan kelapa sawit yang sangat pesat (Casson, 2000). Pertumbuhan kebun yang cepat itu dapat dilihat dari penambahan luas areal, jumlah produksi (Kompas, 28 Februari 2006), dan jumlah perusahaan perkebunan (Riau Pos, 11 Maret, 2005). *Kedua*, sejak tahun 2006 wilayah-wilayah yang dimekarkan dari 7 menjadi 16 Kabupaten/kota dan Riau sebagai daerah yang terbanyak di dimekarkan di Indonesia, dalam kondisi demikian terjadi pergeseran wewenang pengelolaan sumber daya alam, yang semula didominasi pemerintah pusat, banyak dialihkan ke pemerintah daerah, termasuk perkebunan sawit. *Ketiga*, karena munculnya sejumlah aktor lokal yang semula tidak mampu menyuarakan aspirasi mendadak viral dan mengorganisir gerakan massa. Fenomena inilah yang mendorong penulis melakukan riset. Semoga studi ini dapat mengisi kekosongan kajian dalam politik lokal paling tidak di Riau.

## **Metode**

Proses penelitian ini memakai pendekatan kualitatif menekankan kepada makna dan pemahaman (Denzin & Lincoln, 2009); berfokus dengan berbagi metode, yaitu wawancara, dokumentasi, dan Triangulasi (Trochim, 1999). Tujuannya agar mendapatkan pengamalan langsung dari fenomena yang diteliti (Diah, 1999); terkait pasang surut politik sejarah isu kebijakan sawit di Riau 2000-2010. Riset ini didukung sejumlah jenis data baik sekunder maupun primer (Newman, 2013). Data sekunder, bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, buku hasil penelitian, media cetak dan *online*. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersifat individual atau kelompok, diskusi terfokus (FGD) kepada sejumlah tokoh lokal. Sebelum dilakukan wawancara dilakukan pemetaan aktor lokal terlebih dahulu mengenai sikap politik terhadap isu kebijakan sawit. Para informan yang diwawancarai terdiri dari Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kepala Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga kerja, Kepala Penanaman Modal Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Komisi I, Ketua Fraksi Golongan Karya (GOLKAR) Riau, Ketua Lembaga Adat Riau (LAM), Forum Pemuka

Masyarakat Riau (FKMR), Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Ketua Jaringan Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) dan Para Peneliti Perkebunan Sawit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau. Sementara para informan yang terlibat dalam FGD adalah Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Biro Perekonomian, Ketua WALHI, Ketua JIKALAHARI dan Para Peneliti Perkebunan sawit LPPM Universitas Riau Sikap politik para aktor lokal tersebut dapat digolongkan ada mendukung, tidak mendukung, menerima tetapi dengan sejumlah saran. Informan ditentukan berdasarkan kriteria posisi, reputasi dan pengambilan keputusan (Mas'ood & Coln, 2008). Selain itu data didapat melalui penelusuran dokumentasi dan risalah yang tersedia. Selanjutnya dianalisis dengan kerangka ekonomi-politik modern disistematisasikan dengan empat strategi dari yang sudah dipakai oleh Anwar (2012); yaitu, (1) identifikasi dinamika pergulatan aktor; (2) merumuskan kepentingan aktor dan preferensinya; (3) mengidentifikasi bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan. (4) mengidentifikasi taktik dan strategi tokoh lokal dalam berinteraksi dengan sejumlah institusi lokal. Proses selanjutnya, bertolak dari tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai simplifikasi teori dan data yang diperoleh selama riset.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pergulatan Aktor, Pergulatan Politik**

Dalam perjalanan sejarah perpolitikan elite di Riau tampak diwarnai persaingan kepentingan. Tarik menarik ini pada dasarnya berkaitan dengan persoalan pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) lokal termasuk kelapa sawit. Provinsi ini memiliki SDA sawit terluas di Indonesia, namun sumber daya ekstraktif ini lebih banyak bermanfaat bagi Jakarta. Fakta empiris ini membuat rakyat Riau mengalami kekecewaan. Menurut informan, kekecewaan itu terjadi karena kebijakan ekonomi sawit yang dibuat pusat berorientasi ke Pusat, bukan ke daerah. Akibatnya muncul pemikiran di kalangan aktor lokal mengenai perlunya misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan redistribusi aset, tetapi kemudian perjuangan politik elite ini gagal diwujudkan hingga 2000-2010. Masih menurut informan, kegagalan itu di tingkat nasional menjadi perdebatan, di tingkat lokal menyakitkan. Sebelum masa ORBA yang otoriter, Riau tidak banyak bisa merespons, karena elite lokal yang independen tidak begitu kuat. Kebijakan pusat dan orang yang berorientasi pusat tidak bisa ditolak meskipun bertentangan dengan kepentingan masyarakat Riau. Dalam era inilah misalnya muncul ungkapan "di atas minyak (sawit) di bawah minyak (bumi)" yang dimunculkan oleh tokoh birokrasi yang kontroversial dalam pemilihan kepala Daerah pada masa ORBA di Riau.

Di awal reformasi, sejarah politik lokal berubah, ketika diterapkan kebijakan OTDA melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, yang memberikan kebebasan Daerah untuk memanfaatkan SDA-nya. Implementasi ke dua Undang-undang ini menjadi pintu masuk bagi aktor lokal Riau untuk membicarakan kembali mengenai kebijakan sawit pada waktu itu. Tokoh-toko daerah terdiri dari birokrat, politisi, DPRD, LSM dan tokoh-tokoh budaya lokal bersaing menyampaikan pandangan dan ide isu kebijakan sawit. Tetapi yang jelas para aktor lokal ini sependapat bahwa lokal harus ikut serta dalam memanfaatkan kekayaan SDA sawit. Menurut informan, para tokoh lokal berusaha maksimal memanfaatkan forum dialog, media sosial dan cetak menengahkan gagasan terhadap kapitalisasi sawit untuk Riau. Misalnya para aktor lokal atau tokoh nasional yang bersaing dan ingin terpilih di dalam pemilihan kepala daerah langsung 1999 banyak menyebutkan perjuangan memperoleh bagian lebih besar dari SDA sawit. Jika sebelum OTDA, tokoh lokal yang aktif bertindak hanya dilakukan legislator DPRD dan Birokrasi sipil. Pada awal reformasi 1999, tokoh lokal yang berinisiatif menyampaikan gagasan semakin banyak, tokoh pada awalnya memilih pasif, moderat dalam pendiriannya berubah menjadi dominan. Secara empiris, fakta ini muncul ke permukaan melalui sejumlah tokoh yang berasal dari paguyuban

atau profesi masyarakat lokal dan LSM, gerakan massa, dan kelompok lainnya seperti Riau Merdeka. Dalam situasi demikian, tiba-tiba muncul respons yang beragam dari elite Riau terhadap implementasi kebijakan disektor komoditas sawit.

Seperti telah disebut di depan, implementasi dari sejumlah kebijakan sawit ini oleh negara memunculkan tanggapan berbeda dari tokoh lokal Riau. Respons elite tersebut dapat dipilah ke dalam tiga kategori, yaitu: kelompok yang menolak kebijakan pembangunan mengenai isu sawit. Kedua, kelompok yang menerima. Ketiga, kelompok yang menerima dengan usulan. Respons elite ini intensitasnya semakin meningkat dan diwujudkan karena dalam pelaksanaan kebijakan perkebunan oleh pemerintah (Daerah) menimbulkan kekecewaan masyarakat Riau. Para elite daerah ini kecewa antara lain terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1974 tentang pengembangan usaha perkebunan dan pelaksanaan Keputusan menteri pertanian nomor 753/Kpts/KB.550/12/92 tentang pengembangan Perkebunan Besar. Selain itu, Aktor di Riau resah terhadap pelaksanaan keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Perusahaan Inti rakyat Perkebunan (PIR) Bun dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan usaha perkebunan.

Sementara itu, pihak pemerintahan lokal di Riau memformulasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2001 tentang kewenangan dibidang perkebunan dan membuat tata ruang wilayah (RTRW) dengan menetapkan arah pembangunan perkebunan seluas 3.1333.198 Ha. Dalam pelaksanaannya muncul reaksi para tokoh lokal di Riau. Respons elite tersebut beragam dapat diklasifikasikan bersifat menyetujui, menolak, dan pihak yang mendukung dengan sejumlah prasyarat. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Kepentingan Aktor dalam Perebutan Kendali atas Isu RTRW Riau Tahun 2000-2010

INDIKATOR	KELOMPOK MENYUKUNG		KELOMPOK MENYUKUNG DGN SYARAT		KELOMPOK MENOLAK	
	Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah
<b>Aktor</b>	Gubernur, Bupati, Camat, Kades, Disbun, Dishut, BPN, Disnaker, Bappeda, Disperindag	Komisi A-B GAKPI, RAPP, Indah Kiat, Dupon, Wilmar, PT. Tranfera	WanAB, Kab.Inhu, Siak, Kampar	PPP, PKB, PDIP, Akademisi, Almadi, PPLH UNRI	-	TR , Edy, Jali, Walhi, LBH, LPAD, Elang, KAR, AMAR, Sialang, Jikalahari, Sawit Wach, Pylomina,
<b>Kepentingan</b>	Pembagian kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Izin Usaha Perkebunan	Peruntukan lahan	Peruntukan lahan	-	Pengembalian hutan lahan dan Sesuai dengan fungsi lindung
<b>Basis Institusional</b>	Birokrasi	Bisnis dan masy. lokal	Birokrasi	LSM, akademisi, dan Parpol	-	LSM dan akademisi

INDIKATOR	KELOMPOK MENDUKUNG		KELOMPOK MENDUKUNG DGN SYARAT		KELOMPOK MENOLAK	
	Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah
<b>Sumber Daya Politik</b>	Akses informasi dan pembuatan keputusan lokal	Pengendalian finansial	Kewenangan dan akses ke pucuk pimpinan	Akses jaringan kelembagaan sosial dan politik	-	Membentuk wacana dan mengendalikan n massa

Sumber: Data Diolah.

Menurut aktor dalam posisi menolak, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perkebunan besar swasta terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut kelompok ini usaha pengembangan kelapa sawit seharusnya berorientasi pada pemerataan. Sedangkan, aktor yang mendukung berpendapat bahwa pembangunan kelapa sawit dapat mendatangkan devisa bagi negara dan Daerah. Sementara itu, menurut aktor yang mendukung dengan sejumlah syarat berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, tetapi tidak mengesampingkan pemerataan. Para aktor lokal ini terdiri dari birokrat, politisi, tokoh partai politik, dan sejumlah tokoh masyarakat mengusung terus isu kebijakan DBH dan retribusi aset. Para aktor lokal tersebut menggunakan pengaruh melalui berbagai arena baik formal maupun informal misalnya kebudayaan

### **Kepentingan Aktor**

Pada awal reformasi 2000-2010, perpolitikan lokal Riau semakin dinamik dan kepentingan para aktor semakin beragam. Seolah-olah aktor lokal bergerak sendiri-sendiri di mana gagasan daerah muncul diinisiasikan dalam kepentingan personal atau terlembaga dalam organisasi misalnya partai politik dan Organisasi masyarakat lokal. Jika pada masa Orba kepentingan lokal sebatas ganti rugi lahan yang dikonversi oleh Pemerintah menjadi perkebunan kelapa sawit. Sesudah 1999, kepentingan aktor lokal meluas kepada tuntutan individual atau kelompok akan kendali perkebunan kelapa sawit baik milik PBS maupun PBSN sebagai aktor nasional dan Perusahaan Multi Nasional sebagai aktor global berkantor di Malaysia dan Singapura. Para aktor nasional berjuang memperebutkan kepentingannya yaitu memperoleh devisa dan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sejumlah regulasi dan negosiasi. Aktor lokal berjuang mendapatkan akses produksi, ganti rugi lahan, kesempatan kerja, dan posisi tawar jabatan melalui arena negosiasi, kerja sama dan regulasi daerah. Sementara aktor global memiliki kepentingan berupa perizinan dan hak pengelolaan melalui akses kepengambilan keputusan lokal maupun nasional. Kondisi seperti inilah yang menjelaskan sisi kepentingan perorangan dengan kelompok sering kali berimpitan dan kepentingan Pemda seakan-akan formalitas saja. Beberapa informan sependapat bahwa pertimbangan para tokoh lokal dalam memilih kebijakan perkebunan sering kali memiliki preferensi untung-rugi individual yang pragmatis. Secara rasional, para pengambil kebijakan lokal dan nasional akan memilih kebijakan yang menguntungkan meskipun bergulat misalnya dalam memutuskan bentuk skema perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di Riau.

Sebelum 1999, perdebatan aktor memang tidak terjadi di tingkat lokal. Karena Pusat lebih dominan, aktor lokal hanya perpanjangan tangan Jakarta. Aktor nasional dan global berkolaborasi memanfaatkan sumber daya sawit di Riau melalui sejumlah aturan yang di buat pemerintah pusat misalnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), Undang-Undang Penanaman Dalam Negeri (PMDN) dan Keppres No.55/1993 yang mengatur mekanisme

pembebasan lahan masyarakat untuk pertanian. Sesudah reformasi 1999, tumbuh keleluasaan aktor lokal dalam membuat pilihan-pilihan kebijakan perkebunan, meskipun kendali politik di tangan pusat. Hal ini tampak misalnya dari tarik menarik kepentingan aktor dalam formulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Riau tahun 2009 yang mengacu kepada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Para aktor nasional berpandangan bahwa konsepsi kepentingan perencanaan hutan tidak bisa dipisahkan dalam tata ruang wilayah seperti diklaim Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Sementara menurut aktor lokal bahwa kepentingan lokal dalam TGHK adalah tata ruang tidak mencakup hutan lindung dan hutan produksi. Perdebatan ini hingga kini terus berlangsung terkait izin pembebasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Perbedaannya, sebelum 1999, TGHK antara aktor lokal dan Pusat. Setelah 1999 diterapkan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah, perdebatan kepentingan TGHK terjadi hingga kini antara aktor lokal, nasional, dan Global.

Kepentingan para tokoh Riau terkait isu kebijakan pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit hingga kini tampak juga dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Riau 2005, 2008, 2013 dan 2018. Bagaimana para elite bersaing setelah mendapat dukungan pusat melalui organisasi partai politik tampak dalam sesi tanya jawab memaknai isu sawit dalam rangka merebut hati masyarakat, tegasnya isu sawit menjadi isu politik lokal yang diperdebatkan dalam arena politik lokal (Santoso et al., 2018).

**Tabel 2.** Beberapa Kepentingan Aktor Dalam Pemilihan Gubernur Konteks Isu Kebijakan Sawit di Riau

<b>Aktor</b>	<b>PASANGAN CALON 1 S – E</b>	<b>PASANGAN CALON 2 L – H</b>	<b>PASANGAN CALON 3 F – R</b>	<b>PASANGAN CALON 4 A – S</b>
<b>Elemen</b>				
<b>Tujuan /Preferensi</b>	Menjadikan Riau Sejahtera, maju, ramah dan kreatif berlandaskan pada agama, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.	Membangun dan membangkitkan kembali keunggulan-keunggulan yang selama ini 'terkubur' di Provinsi Riau, khususnya di sektor ekonomi. Riau menjadi pusat perekonomian se-Asia Tenggara dan pusat kebudayaan Melayu	Membangun Riau menjadi Madani, berkemajuan serta berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan.</li> <li>- mewujudkan perekonomian (ekonomi sawit) yang merata dan berdaya saing.</li> <li>- mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.</li> <li>- mewujudkan norma dan nilai budaya Melayu dalam sikap hidup serta mengembangkan pariwisata berbasis budaya.</li> <li>- mewujudkan aparaturnya yang profesional.</li> </ul>
<b>Visi</b>	Terwujudnya Riau yang berdaya saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia	Mewujudkan Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian (ekonomi sawit) Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Batin di Asia Tenggara Tahun 2020	Terwujudnya Riau Madani Berkemajuan Dan Berkeadilan	Mewujudkan Riau Yang Lebih maju, Berdaya saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat Yang Sejahtera Serta berkeadilan

Aktor	PASANGAN CALON 1 S – E	PASANGAN CALON 2 L – H	PASANGAN CALON 3 F – R	PASANGAN CALON 4 A – S
<b>Elemen</b>				
<b>Program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Infrastruktur di seluruh pelosok Riau</li> <li>- Perbaikan ekonomi masyarakat Riau (sumber daya ekonomi Sawit)</li> <li>- Meningkatkan usaha pertanian tanaman pangan</li> <li>- Membuat balai latihan kerja di Riau yang dinaungi Kementerian Ketenagakerjaan RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program bangkit desa, yakni program 1 Milyar per desa per tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan sumber daya manusia (SDM)</li> <li>- Pengembangan Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program asuransi untuk 500 ekor sapi bagi para peternak di Riau (Program Riau menuju swasembada daging)</li> </ul>
<b>Basis Institusional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasdem, PAN, PKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKB, Gerindra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demokrat, PPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Golkar, Hanura, PDIP</li> </ul>
<b>Sarana Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Sosialisasi</li> <li>- Media cetak dan <i>online</i>/media massa</li> <li>- TV Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat sosialisasi</li> <li>- Media cetak dan <i>online</i>/media massa</li> <li>- TV Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Sosialisasi</li> <li>- Media cetak dan <i>online</i>/media massa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat sosialisasi</li> <li>- Media cetak dan <i>online</i>/media massa</li> <li>- Pasar</li> </ul>

Sumber: Data Diolah.

Di Riau, kepentingan politik aktor dan kepentingan masyarakat dalam batas-batas tertentu ada dinamika pasang-surut mulai sejak industri bisnis sawit dikembangkan tahun 1975/76 hingga masa diterapkan kebijakan desentralisasi di Riau. Akan tetapi perdebatan mengenai isu kebijakan sawit sudah ada sejak implementasi proyek PIR tahun 1970. Program ini didukung oleh birokrat lokal dan perusahaan perkebunan negara PTP V dan PTP II di sungai Rokan Tandun pada tahun 1970. Pada waktu itu, intensitas tarik menarik kepentingan tidak terjadi. Karena dalam perpolitikan ORBA tidak mungkin ada penolakan. Apalagi kebijakan ini didukung oleh pejabat pusat yang ada di daerah dan diperkuat oleh hasil penelitian Marihat Medan tahun 1976 yang merekomendasikan bahwa provinsi Riau sangat potensial bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Demikian ketika Tahun 1975/1976, Industri bisnis sawit hadir di Riau. Bisnis ini diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) PT. Plantagen-A dengan luas 1000 Ha seperti yang dicatat (Anwar, 2012). Pada masa ini tidak penolakan, sehingga gagasan kebijakan sawit berjalan pada masa itu sebetulnya dikarenakan dalam perpolitikan otoriter tidak mungkin ada penolakan. Oleh karena itulah, dalam era rezim otoriter ORBA, isu kebijakan sawit tidak bisa tampil ke permukaan diperdebatkan masyarakat Riau.

Kebijakan sawit menjadi isu lokal sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan OTDA tahun 2000 misalnya program pembangunan kampung seperti dilaporkan Anwar (2021), adanya sikap pro-kontra di antara kelembagaan yaitu antara aparat Pemerintah Desa,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, PPK desa, organisasi kepemudaan dan ninik mamak seperti yang dilaporkan (Ridwan et al., 2013). Secara faktual, dalam aspek ekonomi, harus diakui usaha industri sawit memberikan kemungkinan lapangan kerja dan devisa Negara. Namun bersamaan itu muncul potensi konflik sosial yang tinggi. Sedangkan dalam aspek politik usaha industri kelapa sawit pada awalnya membuka potensi demokratisasi di tingkat lokal seperti yang dilaporkan (Anwar, 2019). Proses politik menentukan proses kebijakan (Febrina & Isril, 2018); Akan tetapi munculnya kelompok oligarki misalnya menjadi kendala struktural dalam mendemokratisasikan politik lokal. Karena kekuasaan diletakkan dalam perspektif konfliktual (Hasanuddin, 2018). Sementara itu, kontekstualisasi politik lokal berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi seperti diungkapkan (Anwar, 2009; Nordholt & Klinken, 2007). Dinamika setelah *setting* politik nasional berubah seharusnya memberikan perubahan warna baru bagi demokratisasi lokal di Riau.

Dalam praktiknya bisnis sawit membuka munculnya monopoli usaha industri sawit dari hulu hingga ke hilir. Mengapa kemungkinan ini dapat terjadi? Menurut informan, karena sifat politik ekonomi industri sawit semakin ke hilir para aktor yang terlibat semakin terbatas. Sementara Minyak sawit sudah menjadi kebutuhan publik sebagai bahan baku dari sejumlah produk turunan. Bagaimana hubungan mikro politik yang ada dalam hal transfer teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, pengalaman beberapa kasus negara berkembang, pembangunan masyarakat pedesaan dilakukan dalam bentuk program pemerintah, mampu memperluas ruang partisipasi (Rai & Smucker, 2016). Hicks et al. (2013), menulis bagaimana pentingnya menyeimbangkan berbagai perspektif pemangku kepentingan untuk partisipasi. Sehingga O'Hara & Clement (2018), menemukan bahwa respons petani terhadap dampak kebijakan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi adalah ditentukan pengalaman kebijakan negatif di masa lalu termasuk di kalangan perempuan.

Untuk kasus Riau, adanya “dorongan” dan “*political will*” menjadikan perkebunan sebagai “*leading sector*” tampak jelas dari pembangunan kelapa sawit. Akan tetapi, pergulatan politik para tokoh lokal yang terjadi dalam masa tahun-tahun pertama era reformasi secara resiprokal, ternyata gagal menghasilkan berbagai keputusan daerah yang menguntungkan masyarakat Riau. Pengalaman penerapan kebijakan negatif di masa lalu akan banyak menentukan bagaimana masyarakat termasuk petani dalam menghadapi risiko (Niles et al., 2013). Fenomena empiris ini tampak dari pembangunan kelapa sawit awal reformasi di Riau.

Ada tiga arena isu utama yang menjadi basis kepentingan aktor lokal dan nasional dalam pergulatan isu sawit yaitu; arena perizinan, isu konflik lahan, serta isu kebijakan skema bentuk pengelolaan perkebunan sawit (PIR, Kemitraan, swadaya, dan K2-I) (Anwar, 2021). Menurut informan, para pelaku bisnis sawit PBS/PBN adalah para pihak yang diuntungkan dalam konteks pergulatan politik isu kebijakan sawit. Oleh sebab itu, pasang surut pilihan terhadap sikap mendukung keputusan bidang sawit di Riau adalah rasional. Masih menurut informan, para pelaku usaha perkebunan sawit dalam memperjuangkan kepentingan bisnis sawit, para pelaku bisnis ini mengorganisir diri dengan berbagai pihak dengan berlindung dibalik struktur kebijakan perkebunan sawit baik bersumber dari negara ataupun yang diformulasikan daerah. Selain itu, para pihak ini melakukan negosiasi dengan berbagai elite lokal di Riau. Selanjutnya, ketika kebijakan desentralisasi dan OTDA di terapkan pengaruh politik pelaku bisnis dari pusat ini “dirampas” oleh para tokoh lokal yang terdiri dari elite partai politik, aktor lokal, LSM, kelompok preman, dan sejumlah akademisi dalam akses ke sumber daya (Anwar, 2021; Ishak, 2015). Para tokoh ini adalah para elite yang termasuk aktor yang menolak atau menerima dengan sejumlah usulan implementasi program sawit. Para elite lokal ini berupaya menanamkan pengaruh dalam dinamika formulasi agenda pemerintah lokal dan keputusan pusat melalui jaringan lokal di Jakarta. Negosiasi dalam menanamkan pengaruh ini,

para tokoh lokal memanfaatkan berbagai arena sosial-politik misalnya jaringan partai politik, paguyuban, alumni, profesi mulai dari Rukun Tetangga (RT) hingga Jakarta. Bahasa lain mengatakan bahwa terjadi pergeseran struktur kekuasaan dalam masyarakat Riau (Ishak, 2015).

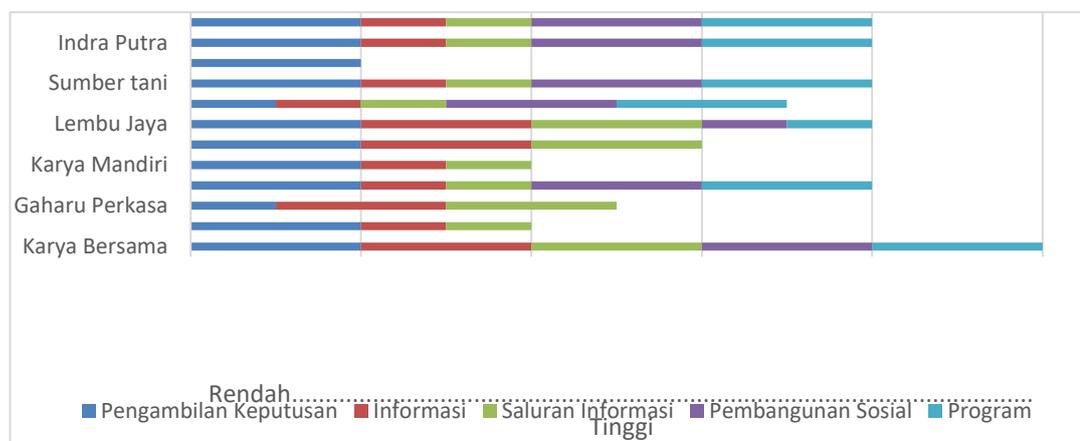
### **Sumber Daya Aktor**

Seperti yang disampaikan di depan bahwa pasang surut politik sejarah isu kebijakan sawit di Riau, sebelum reformasi 1998 banyak dipengaruhi oleh sifat interaksi elite dalam situasi konflik antara aparatur birokrasi lokal, elite partai, dan pelaku usaha perkebunan. Ketika kebijakan desentralisasi dan OTDA diterapkan, perpolitikan di Riau ditentukan oleh tarik menarik kepentingan antara aparatur pemerintah, swasta, elite partai, Lembaga Sosial, dan aktor masyarakat. Para aktor ini memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan politik yang berbeda beda dalam bersaing berebut pengaruh dalam lingkungan proses kebijakan lokal terkait isu kebijakan sawit. Para aktor pemerintah lokal dan nasional, menanamkan pengaruh melalui jaringan partai, kelompok kepentingan, pemilik modal dalam mengeksploitasi akses kepengambilan keputusan lokal dan nasional. Para elite ini menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang menguntungkan pihak pemilik modal besar. Para Politisi, menanamkan pengaruh dalam proses perebutan kendali atas perkebunan sawit di Riau. Partai cenderung menjadi pelengkap demokrasi, pengaruh ini bersumber dari kekuasaan dalam proses kebijakan lokal dengan cara memperkuat “*leverage*”-nya dalam perpolitikan Riau (Asrida et al., 2011).

Sementara itu, para pelaku bisnis perkebunan sawit memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan pengaruh politik ke dalam proses kebijakan pusat dan lokal. Para pemilik modal ini memiliki kepentingan melakukan ekspansi usaha sawit di wilayah Riau. Koalisi antara birokrat, pelaku bisnis sawit, dan elite lokal. Koalisi kelompok ini, memiliki basis institusional berbeda-beda. Namun memiliki pengaruh kuat dalam memobilisasi dukungan terhadap pertumbuhan kelapa sawit atau bisnis industri kelapa sawit di Riau misalnya mampu menambah luas perkebunan sawit, ditengah-tengah keterbatasan lahan. Kemudian, ditengah-tengah pola kemitraan plasma dan inti yang timpang, para tokoh mampu memobilisasi dukungan terhadap pola kemitraan. Kendali pelaku bisnis sawit terhadap penggunaan lahan untuk sub sektor perkebunan di provinsi Riau tampak dari data peruntukkan pengembangan perusahaan perkebunan baik Negara maupun swasta nasional mencapai 2. 400. 260 Ha. Secara detail adalah sebagai berikut: (1). Tahap pencadangan berjumlah 287 perusahaan dengan luas 1. 379. 033. 932 ha. (2). Tahap izin lokasi berjumlah 140 perusahaan dengan luas 545 ha; (3). Tahap pelepasan kawasan hutan berjumlah 158 perusahaan dengan luas 277. 567 ha; (4) Tahap hak guna usaha berjumlah 89 perusahaan dengan luas 748. 123, 068 ha. (Bappeda, 2007; BPS Riau, 2005; Disbun, 2003).

Dilihat dari pola pengembangan perkebunan di Riau tampak keinginan kuat pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam mengembangkan perkebunan termasuk kelapa sawit di Riau. Namun pola ini kenyataannya sebaliknya, justru cenderung perkebunan swasta dan BUMN yang lebih banyak berkesempatan dalam pengelolaan meskipun bukan bagian integral proses produksi (Albintani, 2013). Dalam pertengahan 2010, beberapa kelompok lokal, seperti LSM, tokoh budaya, politisi partai, kelompok preman, akademisi, tokoh Riau di Jakarta, dan pimpinan koperasi petani yang pada era sebelum reformasi diposisikan menolak penerapan kebijakan perkebunan sawit, bersepakat mengusung kebijakan perkebunan sawit yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. Karena para tokoh ini berpendapat pola yang digagas Pemda inilah yang dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan kemitraan antara PBS/PBN dan Pemda. Mengapa? hubungan dualisme sektor modern dan sektor tradisional selama ini, yaitu antara plasma dan inti telah menimbulkan kesenjangan di Riau baik kelembagaan, produktivitas, akses ke pasar domestik maupun internasional dan kesenjangan manajemen

demikian menurut Kibler et al. (2018) serta kepentingan pelayanan publik konsep Vega de la Cruz et al. (2017).



**Gambar 1.** Konteks Sosial-Politik Petani Swadaya  
 Sumber: Data Diolah.

Secara faktual, sepanjang yang dapat diamati pengaruh PBS/PBN begitu besar, para aktor ini digambarkan sebagai pihak yang suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya seperti yang dilaporkan (Anwar, 2019). Hal ini mewarnai konteks sosial-politik petani swadaya pada Gambar 1 menunjukkan bagaimana para petani tergabung dalam kelompok tani "tergantung" kepada pasar yang dikuasai PBS/PBN (Anwar et al., 2021). Kebijakan pemerintah Daerah belum maksimal (Yahyuni & Hasanuddin, dalam mewujudkan kesejahteraan petani (Wicaksono, 2016); ada potensi mengembangkan Koperasi (Asrida et al., 2011). Dalam situasi ini, pemerintah cenderung berada pada posisi mendapatkan investasi sebagai respons jangka pendek seperti yang dilaporkan Felgenhauer dan Webster (2013) dan investasi itu ada pada PBN/PBS. Sementara itu, para tokoh lokal berpikir jangka panjang, yaitu pemberdayaan, inklusi sosial seperti konsep Cherayi dan Jose (2016) dan pembangunan sosial. Dalam kondisi seperti ini menurut O'Hara dan Clement (2018), dibutuhkan bagaimana mendefinisikan pemberdayaan secara bersama. Menurut Sunartiningsih (2004), di sinilah peran negara dalam sebagai institusi menjamin ketertiban kehidupan bersama terutama tantangan menghadapi pemilik kapital yang melakukan investasi di Indonesia.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman empiris lebih lengkap terkait fenomena pasang surut politik dan isu kebijakan sawit seperti sudah diungkapkan dalam narasi pendahuluan, maka metode perbandingan menjadi penting. Karena untuk menjelaskan pasang surut isu kebijakan sawit di Riau tidak terlepas dari kontekstualisasi ekonomi-politik global. Dalam perpolitikan nasional dan internasional kelapa sawit adalah komoditas paling kontroversial. Di Indonesia, paling tidak 20 tahun terakhir, industri sawit dipandang strategis dengan pendapatan ekspor non-migas terbesar setelah batu bara. Sementara di luar negeri, komoditi sawit dimusuhi oleh dua aktor utama dunia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kontroversi ini memberikan pelajaran bagi Indonesia dalam mengendalikan pengaruh terhadap perpolitikan lokal dan nasional. Menurut Cherayi dan Jose (2016); Simon dan Dooling (2013), bahwa negara-negara maju dalam menerapkan industri misalnya Amerika Serikat, China, India, Nepal bahwa pengendalian kebijakan SDM adalah utama selain modal finansial, penataan institusi lokal dan modal sosial. Menurut Anwar (2019), interaksi di perdesaan Indonesia terdiri dari tiga kelas sosial utama yaitu, priayi pemilik tanah, petani, dan borjuasi kota sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di perdesaan. Faktor-faktor yang berperan dalam pembangunan kelapa sawit di Riau tersebut menjadi penting sekali untuk diantisipasi agar tujuan pengurangan

kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui pembangunan kelapa sawit sebagai konsep pembangunan seperti apa yang didefinisikan Dudley Seer dapat terwujud.

### **Kesimpulan**

Bertolak dari pertanyaan penelitian dalam bagian pendahuluan, penulis menarik kesimpulan bahwa pasang surut politik sejarah isu kebijakan sawit di Riau diwarnai pergulatan politik aktor lokal dan pusat, mulai dari masa kolonial hingga terakumulasi pada masa reformasi dewasa ini. Akumulasi pergulatan dinamika interaksi aktor berlangsung dalam situasi konflik dan memakai arena, strategi dan kiat yang beragam dalam merebut akses ke SDA sawit. Kondisi politik lokal pluralistik inilah yang membentuk kontekstualisasi politik sejarah pasang-surut isu kebijakan sawit pada awal reformasi di Riau. Selama ini sepengetahuan penulis bahwa kelapa sawit lebih banyak dikaji dari sisi ekonomi, pertanian, dan sosiologis. Jarang ada studi yang meneliti dari sisi politik lokal. Studi ini memakai arena kebijakan sawit sebagai tempat mempelajari politik lokal. Riset ini memakai paradigma aktor *agency* menemukan bahwa jumlah aktor ternyata semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang tindih dalam memperebutkan hasil kebijakan kelapa sawit. Sifat politik lokal ini menjadi penanda karakter perubahan politik lokal di Riau 2000-2010 dan berimplikasi kepada relasi aktor dalam proses kebijakan publik di tingkat lokal hingga dewasa ini. Model politik lokal dalam perspektif teori kecil (*grounded theory*) inilah yang menjadi kontribusi studi ini kaitan memahami perpolitikan lokal era reformasi, sehingga diharapkan menjadi suatu analisis ekonomi-politik baru dalam mengisi kekosongan kajian teoritis politik lokal selama ini.

### **Daftar Pustaka**

- Albintani, M. (2013). Konstruksi Ekonomi Politik Media Massa: Kasus Pemberitaan Illegal Logging Pada PT. RAPP (2009-2010). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 20. <https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1610>
- Anwar, K. (2009). Kelapa Sawit di Riau: Pejuang atau Tantangan. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(12), 55–63.
- Anwar, K. (2012). *Pola Perubahan Politik Lokal: Studi Kasus Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau 1999 - 2007* (Zulkarnaini, Ed.; 1st ed.). Alaf Riau Publishing.
- Anwar, K. (2019). The pattern of interaction political actors on situations of tenurial conflict in watershed: Case of palm oil in Kampung Dosan. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(5), 1098–1120. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2018-0014>
- Anwar, K. (2021). *Politik & Sawit, Dinamika Politik dan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau Pasca Reformasi*. Pekanbaru (Zulkarnaini, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Alaf Riau.
- Anwar, K., Tampubolon, D., & Handoko, T. (2021). Institutional Strategy of Palm Oil Independent Smallholders: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 229–238. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0529>
- Asrida, W., Tinov, T., & Gia, P. E. (2011). Inventarisasi Potensi Desa Di Daerah Aliran Sungai (Kajian Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(16), 74–83.
- [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. D. (2007). *Kronologis Program K2-I Perkebunan Melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan* (risalah rapat).
- [BPS] Badan Pusat Statistik Riau. (2005). *Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2001-2005*.

- Casson, A. (2000). *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change*.
- Cherayi, S., & Jose, J. P. (2016). Empowerment and social inclusion of Muslim women: Towards a new conceptual model. *Journal of Rural Studies*, 45, 243–251. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.04.003>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, Eds.). Sage Publishing.
- Diah, M. (1999). *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Tidak diterbitkan). [Disbun] Dinas Perkebunan Riau. (2003). *Evaluasi Pembangunan Perkebunan di Provinsi Riau*.
- Faucher, C. (2008). *Menggugat Batas-Batas di Kepulauan Riau*. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).
- Fauzi, Y., Widiyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H. (2012). *Kelapa Sawit; Budidaya, Pemanfaatan Hasil & Limbah, Analisis Usaha & Pemasaran*. Penebar Swadaya.
- Febrina, R., & Isril. (2018). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 101–116. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7063>
- Felgenhauer, T., & Webster, M. (2013). Multiple adaptation types with mitigation: A framework for policy analysis. *Global Environmental Change*, 23(6), 1556–1565. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.09.018>
- Frieden, J., Pastor Jr, M., & Tomz, M. (2000). *Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy*. Westview Press.
- Hasanuddin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 94–100. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062>
- Hicks, C. C., Graham, N. A. J., & Cinner, J. E. (2013). Synergies and tradeoffs in how managers, scientists, and fishers value coral reef ecosystem services. *Global Environmental Change*, 23(6), 1444–1453. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.028>
- Ishak. (2015). Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau: Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 83. <https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2903>
- Kibler, K. M., Reinhart, D., Hawkins, C., Motlagh, A. M., & Wright, J. (2018). Food waste and the food-energy-water nexus: A review of food waste management alternatives. *Waste Management*, 74, 52–62. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.01.014>
- Lasswell, H. D. (1986). *Politik: Siapa Mendapat Apa Bila Bagaimana* (2nd ed.). Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Lestari, R., & Ridwan, M. (2016). Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak: Studi Kasus Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai Siak Tahun 2010-2013. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 11. <https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3217>
- Lubis, & Adlin U. (1992). *Kelapa Sawit di Indonesia*.
- Mas'ood, M., & Coln, M. A. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press.
- Muhaimin, Y. A. (1990). *Bisnis dan politik: kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950-1980*. LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Newman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). PT. Indeks.
- Niles, M. T., Lubell, M., & Haden, V. R. (2013). Perceptions and response to climate policy risks among California farmers. *Global Environmental Change*, 23(6), 1752–1760. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.005>
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. v. (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. KITLV Press.

- O'Hara, C., & Clement, F. (2018). Power as agency: A critical reflection on the measurement of women's empowerment in the development sector. *World Development*, 106, 111–123. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.002>
- Parsons, D. W. (1996). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*.
- Rai, P., & Smucker, T. A. (2016). Empowering through entitlement? The micro-politics of food access in rural Maharashtra, India. *Journal of Rural Studies*, 45, 260–269. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.04.002>
- Ridwan, M., Anwar, K., & Marta, A. (2013). Inventarisasi Kebijakan Publik (Kajian di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(16), 93–101.
- Santoso, P., Bayo, L. N., & Samadhi, W. P. (2018). *Rezim lokal di Indonesia : memaknai ulang demokrasi kita*. Yayasan Pustaka Obor.
- Saragih, B. (2010). *Agribisnis paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian*. IPB Press.
- Simon, G. L., & Dooling, S. (2013). Flame and fortune in California: The material and political dimensions of vulnerability. *Global Environmental Change*, 23(6), 1410–1423. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.008>
- Sunartiningsih, A. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sosiatri Fakultas Sosial Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- Syahza, A., Kozan, O., Mizuno, K., Hosobuchi, M., & Hadi, S. (2020). Restorasi ekologi lahan gambut berbasis kelompok masyarakat melalui revegetasi di Desa Tanjung Leban. *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, 2020–2031*. <https://doi.org/10.31258/unricisce.2.1-9>
- Trochim, W. K. (1999). *The Research Methods Knowledge Base* (2nd ed.). Balai Bahasa Pekanbaru-Diknas.
- Vega de la Cruz, L. O., Lao León, Y. O., & Julbe, A. F. N. (2017). Proposal of a coefficient to evaluate the management of the internal control. *Contaduría y Administración*, 62(2), 699–714. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.03.003>
- Wicaksono, B. (2016). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Salak di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 15(25), 10–20. <https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3847>
- Yahyuni, Y., & Hasanuddin. (2015). Kebijakan Penanggulangan Deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 62. <https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6175>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Yusri, A., & Adlin. (2020). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan Xiii Koto Kampar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 117. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7826>